

## PERAN INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM KEBIJAKAN MONETER

**Nawaliyah, Mohamad Mahfid Ahnan, Nur Ina Avia**

Universitas Trunojoyo Madura

Email: [lianawaliyah6@gmail.com](mailto:lianawaliyah6@gmail.com), [mahfiedahnan11@gmail.com](mailto:mahfiedahnan11@gmail.com),  
[inur91871@gmail.com](mailto:inur91871@gmail.com)

### Abstrak

Instrumen keuangan syariah telah menjadi perhatian utama karena karakteristiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari review literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami peran instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam kebijakan moneter dengan berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, pengendalian inflasi, dan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat. penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen keuangan syariah memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. Oleh karena itu, penting bagi bank sentral untuk mempertimbangkan penggunaan instrumen keuangan syariah dalam pelaksanaan kebijakan moneter guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan.

**Kata Kunci:** Instrumen Keuangan Syariah; Kebijakan Moneter; Stabilitas Ekonomi; Inflasi; Akses Keuangan.

### PENDAHULUAN

Perekonomian modern menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan penanganan yang cermat dan tepat. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter, yang diterapkan oleh bank sentral, bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan kredit dalam perekonomian. Untuk menciptakan lapangan kerja baru, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah tujuan utama kebijakan moneter.<sup>1</sup> Dalam global yang terus berubah, tantangan ekonomi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan etika.

Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen keuangan syariah telah menjadi fokus perhatian utama dalam pengembangan sistem keuangan global. Instrumen keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan etika Islam. Larangan riba, yang dikenal sebagai bunga,

---

<sup>1</sup> A. S. Sinaga, A. Fuadi, and A Sinaga, "Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2021," *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)* 1, no. 2 (2022): 62–71.

larangan spekulasi berlebihan, yang dikenal sebagai gharar, dan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, seperti alkohol atau perjudian, adalah prinsip utama keuangan syariah. Sebagai respons terhadap permintaan yang semakin meningkat akan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, banyak negara telah mengembangkan sistem keuangan syariah yang komprehensif. Hal ini telah membawa perhatian pada potensi peran instrumen keuangan syariah dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk kebijakan moneter.

Tulisan ini akan membahas peran instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter. Dengan menganalisis literatur yang relevan, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana instrumen keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan kebijakan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana instrumen keuangan syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Keuangan Syariah**

Sistem keuangan yang didasarkan pada Islam dikenal sebagai keuangan syariah. Prinsip utamanya adalah larangan riba, spekulasi, dan praktik bisnis yang dianggap haram oleh Islam. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip berbagi risiko antara pemberi dan penerima dana, serta mempromosikan keadilan dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu instrumen utama dalam keuangan syariah adalah akad atau kontrak yang memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Keuangan syariah menggunakan berbagai instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Salah satunya adalah Mudharabah, sebuah jenis kolaborasi di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan manajemen atau keterampilan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Musyarakah adalah alat lain. Ini adalah jenis kemitraan di mana dua orang memberikan modal dan bekerja sama untuk mengelola bisnis, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Selain itu, ada juga Ijarah, kontrak sewa di mana pemilik menyewakan barang atau aset kepada penyewa dengan pembayaran sewa yang telah disepakati, dan Murabahah, yang merupakan transaksi di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli harga dan keuntungan dari barang yang dibeli. Terakhir, wakalah adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal tertentu atas namanya, dengan atau tanpa imbalan.

Tujuan utama dari sistem keuangan syariah adalah untuk memastikan kegiatan ekonomi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, sistem keuangan syariah juga bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Keuangan syariah tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan etika yang kuat.

### **Kebijakan Moneter**

Untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan jumlah kredit yang tersedia bagi ekonomi, bank sentral menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai kebijakan moneter. Mempertahankan stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang sehat adalah tujuan utama kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga bisa berupa kebijakan kontraktif atau ekspansif, tergantung pada kondisi ekonomi. Kebijakan kontraktif diterapkan ketika inflasi meningkat dan perekonomian terlalu panas. Di sisi lain, kebijakan ekspansif digunakan ketika perekonomian melambat dan membutuhkan stimulus.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan mereka, bank sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka, intervensi valas, suku bunga, dan rasio cadangan wajib adalah beberapa instrumen yang paling umum digunakan. Pertama, suku bunga acuan dapat ditetapkan oleh bank sentral, yang berdampak pada tingkat suku bunga di pasar keuangan. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi belanja dan investasi, menghambat inflasi, sementara suku bunga yang lebih rendah mendorong pinjaman dan pengeluaran, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, bank sentral berpartisipasi dalam pasar terbuka untuk membeli dan menjual surat berharga pemerintah, seperti obligasi. Pembelian surat berharga meningkatkan jumlah uang yang beredar, sementara penjualan surat berharga menurunkannya. Ketiga, dengan menggunakan rasio cadangan wajib, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang harus disimpan oleh bank-bank sebagai cadangan. Menurunkan rasio cadangan wajib akan meningkatkan ketersediaan uang untuk dipinjamkan oleh bank. Terakhir, bank sentral dapat melakukan intervensi valas dengan membeli atau menjual mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang negaranya. Bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen-instrumen ini. Tujuan dari penggunaan instrumen-instrumen ini adalah untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Transmisi kebijakan yang tepat ke ekonomi riil adalah salah satu dari banyak variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat memengaruhi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, tetapi faktor lain, seperti kebijakan fiskal, dan faktor eksternal, juga memengaruhi jalan ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan makroekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter terus berubah dan disesuaikan untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul dalam perekonomian.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan memberi penekanan khusus pada tinjauan literatur yang relevan. Metode penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peran instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter. Melalui pendekatan ini, data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal akademik, buku teks, dan laporan riset digunakan untuk menganalisis bagaimana instrumen keuangan syariah dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari peran instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter. Metode kualitatif deskriptif ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara instrumen keuangan syariah dapat digunakan dalam kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman

---

<sup>2</sup> I hakiem arjuna, "kebijakan moneter syariah," *al-buhuts* 13, no. 01 (2017): 104–17.

<sup>3</sup> k ningsih, "jalur pembiayaan bank syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di indonesia," *jurnal ilmiah mahasiswa feb* 1, no. 2 (2012).

yang komprehensif tentang peran instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter dengan menggunakan data dari berbagai sumber literatur.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Stabilitas Ekonomi Berkelanjutan**

Stabilitas ekonomi adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen keuangan syariah memiliki peran krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dari sistem keuangan syariah, yang mendorong penghindaran dari spekulasi berlebihan dan aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat. Tujuan dari prinsip-prinsip ini, yang sesuai dengan hukum Islam, adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dalam transaksi keuangan.

Larangan riba atau bunga adalah prinsip utama keuangan syariah. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dengan menghindari praktik riba, instrumen keuangan syariah mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi didorong oleh aktivitas nyata dan produktif, bukan oleh spekulasi atau utang yang tidak sehat.

Selain itu, instrumen keuangan syariah juga mendorong penghindaran dari aktivitas spekulatif yang berlebihan. Spekulasi yang berlebihan seringkali menjadi pemicu utama dari krisis ekonomi, di mana harga aset tidak lagi mencerminkan nilai intrinsiknya. Dalam sistem keuangan syariah, aktivitas spekulatif yang tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak berkaitan dengan ekonomi nyata dihindari, sehingga membantu mencegah terjadinya gelembung ekonomi yang berpotensi meledak dan menyebabkan krisis.

Selain itu, instrumen keuangan syariah juga mempromosikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dengan mendorong adanya keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat dalam sistem keuangan, instrumen keuangan syariah membantu meningkatkan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya keuangan. Hal ini membantu memperkuat fondasi ekonomi dan mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.

### **Pengendalian Inflasi**

Mengontrol inflasi adalah tujuan utama kebijakan moneter karena inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Instrumen keuangan syariah memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya pengendalian inflasi. Instrumen keuangan syariah menawarkan beberapa mekanisme yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi.<sup>4</sup> Sukuk, instrumen utang syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, adalah salah satu instrumen utama yang dapat digunakan untuk mengatur likuiditas ekonomi.

Sukuk sering kali diterbitkan untuk proyek-proyek infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penerbitan sukuk oleh bank sentral dapat menjadi alat yang efektif untuk menyerap likuiditas yang berlebihan dari pasar. Ketika bank sentral menjual sukuk kepada investor, uang yang digunakan untuk membeli sukuk tersebut dihapus dari peredaran, sehingga mengurangi jumlah uang beredar di pasar. Penggunaan sukuk

---

<sup>4</sup> N. a. aqidah et al., "analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional dalam memengaruhi inflasi di indonesia," *owner : riset dan jurnal akuntansi* 6, no. 3 (2022): 2345–53.

sebagai instrumen kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi tekanan permintaan di pasar.<sup>5</sup>

Selain sukuk, instrumen keuangan syariah lainnya, seperti murabahah dan mudharabah, juga dapat digunakan dalam upaya pengendalian inflasi. Misalnya, bank sentral dapat menggunakan akad murabahah untuk menjual aset kepada bank-bank komersial dengan pembayaran secara bertahap. Bank sentral dapat mengurangi likuiditas di pasar dan mengendalikan inflasi tanpa harus menggunakan instrumen konvensional seperti kenaikan suku bunga.<sup>6</sup>

Instrumen keuangan syariah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional dalam pengendalian inflasi. Instrumen keuangan syariah lebih stabil dan less prone to speculation (kurang rentan terhadap spekulasi). Prinsip-prinsip syariah yang mengatur instrumen keuangan syariah, seperti larangan riba dan spekulasi berlebihan, dapat membantu mencegah terjadinya gejolak pasar yang berlebihan. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko krisis finansial yang dapat memicu inflasi.<sup>7</sup>

Instrumen keuangan syariah lebih berorientasi pada kegiatan riil (real sector). Instrumen keuangan syariah cenderung lebih terkait dengan kegiatan ekonomi riil, seperti investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan bisnis, daripada instrumen keuangan konvensional yang seringkali terfokus pada kegiatan spekulatif di pasar keuangan. Penggunaan instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, sambil mengendalikan inflasi.<sup>8</sup>

Akses keuangan masyarakat dapat diperluas melalui instrumen keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat di banyak negara berkembang tidak memiliki akses yang memadai ke sistem keuangan konvensional. Didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah, instrumen keuangan syariah dapat membantu memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan inflasi.

### **Peningkatan Akses Keuangan**

Peningkatan akses keuangan merupakan salah satu manfaat utama dari pengembangan instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter. Sejauh ini, instrumen keuangan syariah telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui penyediaan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional. Dalam banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, akses terhadap layanan keuangan konvensional masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya tingkat

---

<sup>5</sup> sugianto, "mekanisme transmisi kebijakan moneter di indonesia melalui sistem moneter syariah," *human falah: jurnal ekonomi dan bisnis islam* 2, no. 1 (2015): 50–74.

<sup>6</sup> z. hadi, m. affi, and t chaidir, "analisis transmisi kebijakan moneter melalui instrumen konvensional dan syariah terhadap inflasi di indonesia periode 2014.6-2019.12," *jurnal lentera : kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi* 19, no. 1 (2020): 109–29.

<sup>7</sup> e. m. bayuni and p srisusilawati, "kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di indonesia," *amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah* 2, no. 1 (2018): 18–38.

<sup>8</sup> r. noviana et al., "peran dan konsekuensi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah," *jurnal ekonomi bisnis dan manajemen* 2, no. 2 (2024): 91–99.

pendapatan, dan kurangnya pemahaman tentang produk keuangan. Dalam hal ini, instrumen keuangan syariah menawarkan solusi yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan memperluas akses keuangan bagi lebih banyak orang.

Salah satu cara di mana instrumen keuangan syariah meningkatkan akses keuangan adalah melalui prinsip profit and loss sharing (PLS) yang mendasari banyak produk dan layanan keuangan syariah. Prinsip ini mendorong partisipasi yang lebih luas dalam sistem keuangan dengan memungkinkan individu dan bisnis untuk berbagi risiko dan imbalan. Metode keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah sangat membantu dalam memfasilitasi layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat mengaksesnya.

Mudharabah, misalnya, adalah bentuk kerjasama antara investor (shahibul maal) dan pengelola bisnis (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung oleh investor. Ini memungkinkan individu atau bisnis yang tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri untuk mendapatkan akses ke modal yang mereka butuhkan.

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berbagi modal, manajemen, dan risiko dalam usaha tertentu. Dalam musyarakah, semua pihak terlibat berbagi baik keuntungan maupun kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Seperti mudharabah, musyarakah juga merupakan instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan keuangan konvensional. Dengan memungkinkan individu dan bisnis untuk berbagi risiko dan imbalan, musyarakah memfasilitasi akses ke modal bagi mereka yang membutuhkannya untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, instrumen keuangan syariah juga telah membantu meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan lembaga keuangan mikro dan mikro. Lembaga keuangan mikro dan mikro (LKMM) adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Mereka biasanya menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk pinjaman mikro, tabungan, dan asuransi, kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional.

## **PENUTUP**

Instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang signifikan dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari instrumen keuangan syariah, seperti larangan riba dan spekulasi berlebihan, membuatnya sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Selain itu, instrumen keuangan syariah juga dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Untuk memanfaatkan potensi instrumen keuangan syariah dalam kebijakan moneter dengan lebih efektif, bank sentral perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam menggunakan instrumen keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi staf bank sentral tentang prinsip-prinsip dan instrumen keuangan syariah. Selain itu, bank sentral juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah yang lebih inovatif dan efisien. Bank sentral dapat memanfaatkan potensi penuh instrumen keuangan syariah

dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter dengan lebih baik, serta memperkuat stabilitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aqidah, n. A., i. Ishak, t. Takdir, and m azzahra. “analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional dalam memengaruhi inflasi di indonesia.” *Owner : riset dan jurnal akuntansi* 6, no. 3 (2022): 2345–53.
- Arjuna, l hakiem. “kebijakan moneter syariah.” *Al-buhuts* 13, no. 01 (2017): 104–17.
- Bayuni, e. M., and p srisusilawati. “kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di indonesia.” *Amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah* 2, no. 1 (2018): 18–38.
- Hadi, z., m. Afifi, and t chaidir. “analisis transmisi kebijakan moneter melalui instrumen konvensional dan syariah terhadap inflasi di indonesia periode 2014.6-2019.12.” *Jurnal lentera : kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi* 19, no. 1 (2020): 109–29.
- Ningsih, k. “jalur pembiayaan bank syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di indonesia.” *Jurnal ilmiah mahasiswa feb* 1, no. 2 (2012).
- Noviana, r., e. Ardian, d. Verdyansyah, and r oktafia. “peran dan konsekuensi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah.” *Jurnal ekonomi bisnis dan manajemen* 2, no. 2 (2024): 91–99.
- Sinaga, a. S., a. Fuadi, and a sinaga. “peranan instrumen kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera utara periode 2012-2021.” *Journal of management, economic and accounting (jmea)* 1, no. 2 (2022): 62–71.
- Sugianto. “mekanisme transmisi kebijakan moneter di indonesia melalui sistem moneter syariah.” *Human falah: jurnal ekonomi dan bisnis islam* 2, no. 1 (2015): 50–74.